

Kuasa Survey Dalam Politik Elektoral Indonesia: Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Partai Golkar Di Riau

Muhammad Ansor

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia
ansor@uin-suska.ac.id

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 7 Juli 2024
Halaman : 157-173

Abstract

This article examines a survey of voter behavior in contemporary Indonesian local electoral politics. Its focuses on the internal dynamics of the Golkar Party related to the implementation of the public opinion survey mechanism in the recruitment of candidate heads of district based on case studies in three districts/cities in Riau, namely Kota Dumai, Bengkalis district, and Indragiri district Hulu. My paper examines the responses of the elite and party cadres in the region to the new policy, as well as the dynamics of the conflict it provokes. In addition, the writings also analyze the factors that caused the victory and defeat of the candidate in the Golkar Party in Dumai, and the winning factor in Indragiri Hulu. Data sources consist of a combination of data obtained through both quantitative and qualitative methods. The results of the research found that the Golkar Party's central leadership policy applied surveys as consideration in the recruitment of candidate heads of district, institutionally accepted and understood party leadership in Riau. However, the regional cadres who view the survey as unfavourable for the implementation of party win-win strategies in the region, or hinder the chance of the cadres running with the Golkar Party boat; thus responded critically to the policy. It is believed that an open recruitment mechanism, which offers equal opportunities to both party cadres and candidates from outside the party, undervalues the contributions of internal cadres who have been diligently working to grow the political party.

Keywords:

Political electoral
Political party
Partai Golkar
Riau

Abstrak

Artikel ini membahas survey perilaku pemilih dalam politik elektoral Indonesia kontemporer. Tulisan berfokus pada dinamika diinternal Partai Golkar terkait pemberlakuan mekanisme survey opini publik dalam rekrutmen calon kepala daerah berdasarkan studi kasus di tiga kabupaten/kota di Riau, yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu. Tulisan saya menganalisa respon elite dan kader partai di daerah terhadap kebijakan baru tersebut serta dinamika konflik yang ditimbulkannya. Selain itu, tulisan juga menganalisa faktor yang menyebabkan kemenangan dan kekalahan calon yang diusung Partai Golkar di Dumai, dan faktor kemenangan calon di Indragiri Hulu. Sumber data berasal dari kombinasi data yang diperoleh melalui teknik kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan pimpinan pusat Partai Golkar menerapkan survey sebagai pertimbangan dalam rekrutmen calon kepala daerah, secara institusional diterima dan dipahami pimpinan partai di Riau. Namun, kader di daerah yang memandang survey kurang menguntungkan bagi penerapan strategi kemenangan partai di daerah, ataupun menghambat kesempatan kader mencalonkan diri dengan menggunakan perahu Partai Golkar; sehingga merespon kebijakan tersebut secara kritis. Mekanisme rekrutmen terbuka yang memberi kesempatan setara antara kader internal partai dan calon dari luar partai dinilai kurang menghargai kontribusi kader internal di daerah yang selama ini sudah bekerja keras untuk membesarkan partai.

Kata Kunci: Politik elektoral, partai politik, Partai Golkar, Riau

PENDAHULUAN

Beberapa studi memperlihatkan bahwa survey opini publik memainkan peranan penting dalam konstalasi politik Indonesia kontemporer (Mietzner & Muhtadi, 2019; Tomsa, 2020; Trihartono, 2014). Namun, pemberlakuan mekanisme survey dalam proses rekrutmen pemilihan calon kepala daerah direspon beragama oleh partai politik di tingkat lokal. Tulisan ini membahas dinamika diinternal Partai Golkar terkait diberlakukannya mekanisme survey opini publik dalam rekrutmen calon kepala daerah berdasarkan studi kasus di tiga kabupaten/kota di Riau, yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan

Kabupaten Indragiri Hulu. Pemaparan difokuskan untuk melihat bagaimana respon elite dan kader partai di daerah terhadap kebijakan baru tersebut serta dinamika konflik yang ditimbulkannya. Selain itu, tulisan menganalisa faktor yang menyebabkan kemenangan dan kekalahan calon yang diusung Partai Golkar. Sejalan dengan itu penulis juga mendiskusikan faktor kekalahan calon Partai Golkar di Dumai, dan faktor kemenangan calon di Indragiri Hulu.

Partai Golkar dipilih sebagai subyek pembahasan karena partai ini cukup konsisten menerapkan mekanisme survey dalam rekrutmen calon kepala daerah (Tanjung, 2007; Trihartono, 2014). Selain Partai Golkar, sebetulnya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) masa kepemimpinan Sutrisno Bachir melakukan hal sama. Namun, dua partai terakhir kurang konsisten menerapkan kebijakan tersebut dibandingkan Partai Golkar. Ini barangkali terkait biaya yang diperlukan untuk survey opini publik relatif mahal. Sehingga tidak semua partai mampu melakukannya, apalagi menerapkan sebagai kebijakan nasional, atau dipraktikkan di semua propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (Tomsa, 2020).

Partai Golkar masa kepemimpinan Abu Rizal Bakrie, pengusaha besar yang pernah menempati posisi sebagai salah satu terkaya di Indonesia, memiliki sumber daya dan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan survey. Keberadaan pengusaha dalam partai politik memang berpengaruh pada dinamika partai politik termasuk dalam proses rekrutmen pemimpin daerah (Fukuoka, 2012). Namun, karena mekanisme survey dalam rekrutmen calon kepala daerah pendekatan baru dalam praktik kepolitikan Indonesia, kebijakan tersebut ditanggapi beragam oleh kader di daerah. Selain itu, karena mekanisme ini memberi kesempatan yang setara antara kader murni partai dan calon dari luar partai yang ingin menggunakan perahu Partai Golkar, tidak jarang muncul konflik di internal partai, yang —seperti kasus yang diperlihatkan pemaparan ini— justru menghambat tujuan kemenangan Pilkada.

Bagi sebagian kader atau elite Partai Golkar di daerah, hasil survey terlalu “berkuasa” mengarahkan figur yang dinilai paling layak diusung partai sehingga acapkali menafikan arti penting masukan kader di daerah. Sebenarnya partai tidak sepenuhnya melepaskan kendali dalam rekrutmen calon. Hanya sebagian kecil yang didelegasikan ke rakyat, yakni dalam soal menyediakan tiga orang nama yang akan dipilih partai. Namun seperti diperlihatkan kasus di Riau, tidak satu pun dari tiga orang yang ditawarkan merupakan figur yang dikehendaki kader partai di daerah.

Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi (Mujani et al., 2012) menyatakan bahwa memilih seorang kandidat adalah keputusan terpenting yang harus dilakukan partai politik. Hal senada dikatakan Fareed Zakaria bahwa tugas partai politik adalah melakukan rekrutmen politik untuk mendapatkan kepemimpinan terbaik bagi bangsanya (Zakaria, 2004). Begitu proses ini dicabut dari tangan organisasi partai politik dan diberikan kepada pemilih, organisasi partai menjadi sekedar tameng saja. Terpilihnya kader luar partai produk mekanisme survey, terkadang membuat partai merasa kehilangan muka, karena kader inti partai rupanya bukan figur yang disukai pemilih. Tidak heran, sebagian kader di daerah menilai survey tidak lebih sekedar aksi pembajakan partai oleh pemilih yang malangnya mendapat persetujuan pimpinan pusat (Ford, 2014). Maka rekrutmen calon pun acapkali berubah menjadi pagelaran konflik para kader internal (Fossati et al., 2022), sehingga mengakibatkan hilangnya militansi kader dalam memperjuangkan kemenangan calon yang diusung.

METODE

Sumber data tulisan ini berasal dari kombinasi data yang diperoleh melalui teknik kuantitatif maupun kualitatif (Adler et al., 2020; Huberman & Milles, 2009), sebuah model yang pernah dilakukan Saiful Mujani dalam penelitiannya tentang muslim dan demokrasi di Indonesia (Mujani, 2008). Data

kuantitatif sebagian besar didapatkan dari penelitian yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI), —dan pada kadar tertentu memanfaatkan data survey The Riau Institute (TRI),— dimana penulis merupakan salah satu anggota tim terutama dalam penelitian yang disebutkan terakhir. Keterlibatan penulis sebagai salah satu enumerator dalam tiga penelitian LSI yang dilakukan di Dumai, Bengkalis dan Indragiri Hulu sebelum masa penetapan calon, dan satu kali survey The Riau Institute yang dilakukan di Indragiri Hulu sebulan setelah penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah oleh KPU Indragiri Hulu.

Survey LSI berjudul *“Masalah Sosial Kemasyarakatan di Dumai, Bengkalis dan Indragiri Hulu”*, dilakukan Desember 2009. Responden di masing-masing kabupaten/kota sebanyak 400 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Sementara Survey Perilaku Pemilih di Indragiri Hulu dilakukan pertengahan April 2010, melibatkan 400 responden, dengan menggunakan metode sampling yang sama. Namun jangan Anda berharap tulisan ini memaparkan analisis teknis kuantitatif hasil survey tersebut, karena tulisan ini akan memfokuskan pada dinamika politik di Partai Golkar Riau yang muncul terkait dengan hasil survey tersebut.

Di samping survey opini publik, penulis terlibat pula dalam studi kualitatif yang diselenggarakan LSI di Bengkalis, Indragiri Hulu dan Dumai. Pertama, studi kualitatif aspek sosial, ekonomi dan politik para bakal kandidat yang diusung Partai Golkar di Bengkalis dan Indragiri Hulu dilakukan pada awal Februari 2010. Survey ini merupakan pendalaman dari temuan survey opini publik dengan difokuskan pada tiga nama yang memperoleh dukungan terbesar. Kedua, studi kualitatif evaluasi pelaksanaan pilkada di Dumai yang dilakukan akhir Juni 2010. Terkait dengan kedua studi tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam sejumlah responden, terdiri dari elit politik, jurnalis, akademisi, tim sukses calon, dan pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Partai Golkar Riau

Kemenangan Partai Demokrat secara nasional pada Pemilu Legislatif April 2009 tidak cukup mampu menggeser dominasi Partai Golkar di Riau. Terkecuali Pemilu perdana tahun 1955 yang dimenangkan Partai Masyumi, Partai Golkar konsisten meneguhkan kekuasaan di bumi lancang kuning. Kemenangan selama Pemilu 1971-1997 merupakan suatu kenormalan, mengingat selama kurun waktu tersebut, partai ini memang mendominasi kemenangan baik dalam pemilihan tingkat nasional maupun daerah. Namun konsistensi kemenangan di Riau pada tiga kali Pemilu yakni 1999, 2004 dan 2009, saat di banyak tempat di Indonesia partai ini mengalami keterpurukan; agaknya perlu ditempatkan pada posisi yang istimewa.

Pasca reformasi, kader-kader Partai Golkar masih tetap menempati posisi-posisi strategis jabatan publik di daerah ini. Tiga dari sepuluh kursi anggota DPR Daerah Pemilihan Riau pada Pemilu 2004 berasal dari Partai Golkar, dan mengalami peningkatan menjadi empat kursi saat pemilu 2009. Posisi Ketua DPRD dan Gubernur Riau tidak pernah lepas dari kendali Partai Golkar. Demikian pula, seluruh posisi Ketua DPRD di tingkat kabupaten/kota hampir semuanya diisi kader Partai Golkar. Partai Golkar hanya kehilangan kendali atas posisi Ketua di DPRD Pekanbaru, saat pada Pemilu April 2009 Partai Demokrat memenangkan perolehan kursi di legislatif.

Sementara itu, dalam Pilkada selama periode 2005-2008, partai berlambang beringin rimbun ini mengukuhkan memenangkan di tujuh dari sebelas pemilihan di tingkat kabupaten/kota. Tiga Kabupaten/Kota yang lepas dari kendali Partai Golkar dalam Pilkada selama 2005-2008 adalah Dumai (Zulkifli As, Kader Partai Demokrat), Siak (Arwin As, Birokrat, calon dari PDIP) dan Indragiri Hulu

(Thamsir Rahman, Kader Partai Demokrat). Riau, selama kurun waktu tersebut merupakan daerah dengan prosentase kemenangan Pilkada terbesar setelah Propinsi Gorontalo dan Kepulauan Riau.

Pendekatan yang cukup relevan menjelaskan arti dominasi Partai Golkar di Riau pasca reformasi barangkali teori kultur politik identitas (Ansor, 2006). Kader-kader partai di daerah yang menempati posisi strategis dan jabatan publik lainnya mayoritas orang Melayu (Long, 2013). Memang, masyarakat Riau mayoritas beretnis Melayu (Ansor & Darwis, 2006; Ansor & Masyhur, 2023; Helmiati, 2021), meski di beberapa tempat seperti di Indragiri Hulu, Bengkalis dan Kepulauan Meranti, prosentase orang Jawa menempati posisi yang cukup signifikan. Demikian pula orang Minang di Pekanbaru yang populasinya penting diperhitungkan. Tidak dinafikan, politik identitas kemelayuan menjadi arus utama wacana publik di Riau semenjak era reformasi (Ansor et al., 2023; Hasbullah et al., 2022). Karena itu, kemampuan partai mengelola isu politik identitas dengan tetap mempertahankan citra sebagai partai pluralis dan multikulturalis, tampaknya berkorelasi positif terhadap kemenangan partai satu dekade terakhir.

Di samping itu, faktor lain yang berkontribusi atas kemenangan Partai Golkar dalam momen-momen elektoral selama satu dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari keberadaan para kader partai yang lebih diminati Masyarakat (Nurcholifah, 2022; Tanjung, 2007). Rusli Zainal misalnya, Gubernur Riau selama dua periode terakhir merupakan kader Partai Golkar yang berhasil memainkan emosi massa orang Riau untuk tetap mempertahankan dukungan kepadanya saat Pilkada 2008, meskipun selama masa pemerintahannya dia selalu menjadi sasaran kritik dari kalangan kelas menengah dan organisasi masyarakat sipil setempat. Demikian pula di tingkat kabupaten dan kota, kader Partai Golkar memiliki kompetensi mobilisasi politik melebihi kemampuan yang dimiliki kader-kader partai lain. Hal ini merupakan akumulasi dari kemampuan organ dan para kader partai mempertahankan kendali atas jejaring ekonomi, budaya dan politik di daerah selama ini.

Memasuki awal 2010, Musda DPD I Partai Golkar Riau memilih Indra Mukhlis Adnan sebagai Ketua menggantikan Rusli Zainal. Keberhasilan Bupati Indragiri Hilir ini mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar tidak dapat dilepaskan dari peranan Rusli Zainal. Indra yang selama ini merupakan eksekutor atas kebijakan Rusli Zainal, di satu sisi menjadikannya figur penting di Partai Golkar Riau, tapi dipihak lain mencitrakan dirinya sebagai politisi lapangan. Di tengah transisi kepemimpinan baru inilah tampaknya Pilkada Riau 2010 perlu ditempatkan. Indra Mukhlis Adnan yang sedang dalam proses konsolidasi internal kepartaian, pada saat bersamaan mempersiapkan Pilkada di Riau, dengan mekanisme rekrutmen calon kepala daerah yang masih baru pertama kali diterapkan: mekanisme survei.

Rekrutmen Calon Kepala Daerah di Partai Golkar

Mengakomodasi masukan banyak pihak, ditambah kesadaran pentingnya faktor figur dalam memenangkan kontestasi politik elektoral di Indonesia satu dekade terakhir (Nurlinah et al., 2018), pada Rakornas Januari 2009 Partai Golkar menetapkan mekanisme baru rekrutmen calon kepala daerah. Ketetapan ini diatur dalam SK DPP Partai Golkar No 2 Tahun 2009 tentang Juklak Pelaksanaan Pilkada Partai Golkar. Bagian terpenting dalam ketetapan baru ini antara lain penegasan pentingnya mempertimbangkan hasil survey popularitas seorang bakal calon kepala daerah yang akan diusung partai. Kebijakan ini merevisi keputusan sebelumnya yang menetapkan konvensi sebagai mekanisme penetapan calon yang diusung Partai Golkar. Undang-undang No 32/2004 memang memberi kewenangan kepada masing-masing partai politik untuk menentukan sendiri mekanisme rekrutmen

bakal calon kepala daerah. Karena itu, partai-partai politik memiliki mekanisme internal yang antara satu dengan partai politik lainnya ditemukan persamaan dan perbedaan.

Juklak DPP Partai Golkar No 2 Tahun 2009 menyebutkan rekrutmen kepala daerah dimulai dengan penjangkaran bakal calon secara terbuka, dengan membuka kesempatan yang sama antara kader internal partai maupun dari kalangan luar partai untuk ambil bagian dalam seleksi tersebut. Partai Golkar beralasan, untuk mendapatkan calon pemimpin daerah yang berkualitas, partai perlu mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena itu, sebelum memutuskan figur yang akan diusung, Partai Golkar bekerjasama dengan lembaga survey independen melakukan survey opini publik.

LSI, sebuah lembaga survey independen mendapat kepercayaan untuk melakukan survey di semua propinsi dan kabupaten/kota yang akan melakukan pilkada. Selama tahun 2010, tercatat ratusan kabupaten/kota dan belasan propinsi menyelenggarakan pilkada. Karena itu, selama semester kedua tahun 2009 ini hingga 2010, LSI harus berkerja keras guna menyelesaikan pelbagai survey di berbagai propinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Setelah hasil survey diketahui, DPP Partai Golkar meminta pimpinan partai di daerah untuk mempertimbangkan salah satu dari tiga nama yang memperoleh suara terbesar pertama sebagai kandidat yang akan diusung Partai Golkar dalam Pilkada di daerah bersangkutan. Saat bersamaan, LSI juga melakukan studi kualitatif untuk memetakan aspek politik, ekonomi dan jejaring sosial dari tiga figur yang mendapatkan dukungan survey terbanyak. Sampai di sini, konflik seringkali muncul karena tiga nama yang memperoleh dukungan terbesar dari hasil survey acapkali bukan orang yang dikehendaki kader atau elite partai di daerah.

Sejak semula, keputusan Rakornas tentang mekanisme rekrutmen calon kepala daerah dari Partai Golkar memang ditanggapi secara cemas oleh sebagian besar elite partai di daerah. Bagi sebagian analis politik menilai keputusan ini sebagai mekanisme yang memberi ruang kepada masyarakat dalam penentuan calon yang diusung partai. Hal ini merupakan pertanda keseriusan partai berlambang beringin rimbun ini mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam menentukan calon kepala daerah. Namun bagi sebagian besar kader dan elite di daerah, mekanisme ini dinilai mempersempit peluang mereka untuk mencalonkan diri.

Berdasarkan pengamatan terhadap kasus yang terjadi di Riau, sedikitnya ditemukan tiga model respon elite dan kader Partai Golkar di daerah terhadap mekanisme rekrutmen calon kepala daerah di partai tersebut adalah: menerima, menolak dan menerima setengah hati. Pemaparan bagian berikut ini akan diperlihatkan respon kader Partai Golkar di Dumai, Bengkalis dan Indragiri Hulu terhadap mekanisme rekrutmen calon kepala daerah yang telah diputuskan DPP Partai Golkar pada masa Abu Rizal Bakrie.

Dumai: Pesona Hasil Survey

Pesona duet kepemimpinan Zulkifli As – Sunaryo sebagai Walikota dan Wakil Walikota Dumai selama lima tahun terakhir tampaknya memang cukup meyakinkan sebagian besar partai politik di kota tersebut untuk mendukung pencalonan kembali keduanya dengan paket yang sama. Hasil survey LSI semakin memperkuat penilaian ini. LSI menyebutkan mayoritas responden mendukung diteruskannya kepemimpinan Zulkifli As – Sunaryo lima tahun mendatang.

Bagi Zulkifli As – Sunaryo, temuan LSI merupakan iklan politik gratis. Hasil survey yang tidak pernah dipublikasikan secara resmi itu dengan cepat beredar ke sebagian elite partai politik di Dumai, dan mendesak mereka untuk segera menentukan kandidat yang akan didukung. Lazimnya dunia politik, calon yang diperkirakan akan menang cenderung menjadi tempat merapat partai-partai politik. Karena itu, tidak mengejutkan apabila pada 26 Februari 2010, sebanyak 12 pimpinan partai politik

mendekraskan dukungan pencalonan Zulkifli As dan Sunaryo. Partai politik tersebut terdiri terdiri dari PG, PD, PAN, PKS, PBB, PPP, PDS, PMB, Partai Buruh, Partai Merdeka, PKNU dan PBB.

Di internal Partai Golkar Dumai, keputusan partai mendukung Zulkifli As – Sunaryo dapat dipahami para kader di daerah. Meskipun Zulkifli As merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Riau, namun dia memiliki hubungan yang baik dengan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Partai Golkar di daerah tampaknya tidak terluar mendesak agar salah seorang kader partai menjadi pendamping Zulkifli As. Beberapa kader yang sebelumnya berniat maju menggunakan perahu ini mundur teratur setelah mengetahui hasil survey. Ilyas Labai, mantan Ketua DPRD Dumai yang kini anggota DPRD Propinsi Riau awalnya berniat mencalonkan diri (Wawancara Ilyas Labay, 15 Januari 2010). Namun, terbitnya hasil survey LSI memaksa Labay membatalkan rencana. Dia kalah popularitas dengan kandidat lainnya berdasarkan hasil survey.

Zainal Effendi dan Zulkifli Ahad yang sempat mewacanakan akan mencalonkan diri pun melakukan hal serupa. Demikian pula, Khairul Anwar yang berharap untuk dapat kembali mencalonkan diri melalui dukungan Partai Golkar, harus merelakan partai tersebut mendukung Zulkifli As. Lima tahun sebelumnya, Khairul Anwar – Zulkifli Ahad maju dalam pilkada Dumai melalui Partai Golkar. Tapi saat itu, keberuntungan belum menyertainya, dan orang Dumai lebih memilih Zulkifli As - Sunaryo.

Besarnya dukungan partai politik untuk Zulkifli As – Sunaryo, di satu sisi merupakan political blessing (anugerah politik), namun di pihak lain membuka kemungkinan pasangan ini akan menjadi calon tunggal. Hingga masa pendaftaran, memang Khairul Anwar belum mengumumkan secara resmi pencalonan dirinya. Menurut UU No 34/2004, apabila yang mendaftarkan diri ke KPUD hanya satu pasangan, maka pelaksanaan pilkada ditunda. Mengantisipasi hal ini, koalisi pendukung Zulkifli As menyiapkan “pasangan sekoci” dengan mengajukan Herdi Sulioso – Mas Irba Sulaiman untuk mencalonkan diri (Wawancara Aprizon, Pengurus Partai Golkar Riau, 22 Juni 2010).

Tabel 1 :

Peserta Pilkada 2010 dan Partai Pendukung di Kota Dumai

KANDIDAT	PARTAI PENDUKUNG
Zulkifli As – Sunaryo	PG, PD, PAN, PKS, PBB, PPP, PDS, PMB, PB, P Merdeka, PKNU, dan PBB
Herdi Selioso – Mas Ibra Sulaiman	Partai Non Parlemen
Khairul Anwar Agus Widayat	PDIP, PDK, PKPI

Sumber : Pleno KPUD Dumai, April 2010

Namun, politik adalah seni segala kemungkinan dan adu taktik yang sering tak terpikirkan lawan (Ansor & Darwis, 2006; Muhtadi, 2021). Apa yang terlihat di depan panggung tidak selalu sama dengan yang dibalik panggung (Ansor, 2016). Di hari-hari terakhir pendaftaran di KPUD, pasangan Khairul Anwar – Agus Widayat dengan dukungan utama PDIP kantor KPUD membawa berkas pendaftaran. Khairul Anwar adalah mantan Direktur Cabang Bank Riau di Dumai. Lima tahun sebelumnya pernah dikalahkan oleh Zulkifli As. Saat itu, Anwar yang berpasangan dengan Zulkifli Ahad didukung Partai Golkar. Zulkifli Ahad sendiri adalah mantan Ketua DPC Partai Golkar Dumai, yang kini memimpin koalisi partai pendukung Zulkifli As. Sementara pasangannya, Agus Widayat adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Dumai. Agus Widayat mundur dari jabatannya karena akan mencalonkan diri.

Bengkalis: Rusa Tak dapat, Kancil pun Lepas

Hasil survey LSI direspon kader di daerah dengan sikap bercabang. Tiga nama yang memperoleh suara terbesar adalah Sulaiman Zakaria, Nomansyah Wahab, dan Zulfan Heri. Hasil survey memantik konflik antar kader di tubuh Partai Golkar. Zulfan Heri, anggota DPRD Riau dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Riau sudah lama mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon Bupati dalam Pilkada Bengkalis. Zulfan Heri sedang menantikan apa yang dipahaminya sebagai “takdir Bengkalis” bahwa selama ini Bupati Bengkalis selalu berasal dari Kecamatan Siak Kecil, salah satu kota yang sekaligus tanah kelahirannya (Zulfan Heri, Koran Riau, Maret 2010). Namun, hasil survey LSI yang mengunggulkan Sulaiman Zakaria atas dirinya, mengharuskannya bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan partainya sendiri. Pada akhirnya Zulfan Heri gagal memperoleh tiket dari Partai Golkar untuk maju dalam pegelaran pemilihan kepala daerah di Bengkalis. Partai Golkar sendiri juga gagal menjadi partai pendukung salah satu calon dalam kontestasi politik di Bengkalis.

Tabel 2 :

Peserta Pilkada 2010 dan Partai Pendukung di Kabupaten Bengkalis

KANDIDAT	PARTAI PENDUKUNG
Sulaiman Zakaria – Anwar Mahidin	PPP, PBB, PKB, PDI-P, PPNUI dan PPIB.
Herliyan Saleh- Suayatno	PKS dan PBR
Normansyah Wahab – Syamsul Gusri	PD dan Partai Hanura
Zulfan Heri – Syahril Yunan	PDS, Partai Buruh, Partai Patriot, PDK, Partai BARNAS, PPRN, PRPB, PMB, PPI, Partai PRN, PKNU, PKPB, PPPI, PKPI dan PPDI.

Sumber : Pleno KPUD Bengkalis, 6 April 2010

Nama Herliyah Saleh, Asisten II Propinsi Riau yang belakangan menjadi pemenang Pilkada Bengkalis tidak muncul dalam deretan tiga besar. Padahal sebelum hasil survey LSI diketahui, birokrat yang lima tahun sebelumnya pernah mencalonkan diri di Pilkada Bengkalis ini, sudah lama membangun komunikasi politik intensif dengan Partai Golkar. Herliyan yang selama delapan tahun terakhir selalu menempati posisi-posisi strategis di kabinet Gubernur Ruzli Zainal, harus merelakan lepasnya dukungan Partai Golkar. Hasil survey di Bengkalis memupus harapan untuk membangun persekutuan politik dengan partai yang pernah dipimpin Rusli Zainal.

Tiga nama yang muncul sebagai hasil dari survey LSI merupakan pilihan sulit bagi kader partai di daerah. Sulaiman memang diyakini memiliki basis dukungan yang signifikan baik dalam soal jejaring sosial, politik maupun ekonomi (Wawancara Saiman Pakpahan, Pengamat Politik UNRI, 1 Februari 2010). Masdaruddin, tokoh masyarakat Bengkalis yang penulis wawancarai berkesimpulan demikian (Wawancara Masdaruddin, Tokoh Bengkalis, 2 Februari 2010). Meski seorang birokrat, Sulaiman adalah Ketua LAM Bengkalis, lembaga adat yang sangat diperhitungkan karena beranggotakan para tokoh masyarakat di Bengkalis (Wawancara Idham Chalid, Pengurus Partai Golkar Riau, 30 Januari 2010). Selain itu, Sulaiman juga merupakan Ketua Dewan Tanfidz NU Bengkalis. Namun tidak sedikit kader di daerah yang menolak figur Sulaiman. Ini terutama dari para kader yang mendukung pencalonan Zulfan Heri (Wawancara Saiman Pakpahan, 1 Februari 2010).

Selama menjabat Sekretaris Daerah Bengkalis selama enam tahun terakhir, Sulaiman cukup maksimal memobilisasi birokrasi. Dibandingkan dengan Wakil Bupati Normansyah Wahab, Sulaiman lebih mampu memanfaatkan fasilitas birokrasi untuk tujuan politiknya terkait Pilkada. Ini

dimungkinkan terutama karena dukungan Syamsurizal, Bupati Bengkalis. Bagi Syamsurizal, Sulaiman merupakan satu-satunya figur kandidat pemimpin Bengkalis yang akan tetap berada di bawah koordinasi dirinya, meskipun dia tidak lagi memimpin Bengkalis. Dalam soal jejaring sosial ekonomi, para kontraktor yang selama ini mendapat keuntungan bisnis dari proyek-proyek di APBD Bengkalis, memperlihatkan kecenderungan mereka mendukung Sulaiman.

Sulaiman memang sudah lama mempersiapkan diri untuk maju dalam Pilkada Bengkalis. Karena itu, sebelum elektabilitasnya yang kuat diidentifikasi secara akademis melalui survey LSI, Sulaiman sudah membangun komitmen politik dengan Anwar Mahidin, Anggota DPRD Bengkalis dari PPP untuk mendampingi dirinya. PPP bersedia memberikan dukungan dengan konsesi calon Wakil Bupati berasal dari partai mereka. Karena itu, ketika Partai Golkar menawarkan dukungan dengan konsesi yang sama: kesediaan Sulaiman berpasangan dengan kader dari Partai Golkar; dia menanggapi dingin tawaran tersebut.

Respon dingin Sulaiman terhadap tawaran Partai Golkar, menimbulkan polemik di internal kader. Sebagai pemenang pemilu di Bengkalis, Partai Golkar tidak mungkin memberi dukungan gratis kepada figur luar partai sebagaimana dilakukan di Dumai. Pasalnya, partai ini memiliki banyak kader berkualitas yang siap untuk dimajukan. Terkecuali itu, Zulfan Heri yang gigih juga sudah berhasil mengumpulkan dukungan, dan mendesak partai mencalonkan kader murni. Menyikapi situasi ini, Indra Mukhlis Adnan Ketua DPD Partai Golkar Riau yang akan segera dilantik memasukkan nama Sulaiman sebagai anggota Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Riau. Namun langkah ini menuai protes karena status Sulaiman masih Pegawai Negeri Sipil. Belakangan, Sulaiman sendiri tidak menghadiri pelantikan, meskipun dia tidak secara tegas menyatakan penolakan atas posisi tersebut.

Zulfan dalam beberapa statemen yang dipublikasi media massa setempat menyatakan Partai Golkar melakukan kezaliman karena tidak mendukung kader murni partai. Zulfan memang kader muda partai yang menapaki karier politiknya secara cemerlang dalam delapan tahun terakhir. Mantan pengamat politik UNRI ini mengawali karir politik karena kedekatannya dengan Chaidir, Ketua DPRD Riau 1999-2008. Sejak 2004 sampai sekarang menjadi anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Dumai Bengkalis. Kecemerlangan karier politiknya tidak sebanding dengan citra tentang dirinya dimata sebagian elite Partai Golkar Riau. Zulfan dinilai kurang mampu mengingat peranan dan sumbangan Chaidir. Saat Ketua DPRD ini mencalonkan diri melalui perahu PDIP pada Pemilihan Gubernur Riau Agustus 2008, Zulfan adalah orang yang paling keras menuntut agar sang mentor politik mundur dari Ketua DPRD. Zulfan dikenal pula sering bertindak diluar garis politik Rusli Zainal: figur paling berpengaruh di Partai Golkar Riau.

Meski selama masa sosialisasi Zulfan cukup kreatif merancang strategi politik dan berhasil menyusun tim yang terdiri dari para anak muda pekerja keras, dia kesulitan memobilisasi dukungan politik dan pendanaan (Wawancara Saiman Pakpahan, 1 Februari 2010). Sampai hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah, dia gagal meyakinkan Partai Golkar. Pencalonannya akhirnya didukung koalisi 15 partai non parlemen yang terdiri dari PDS, Partai Buruh, Partai Patriot, PDK, Partai BARNAS, PPRN, PRPB, PMB, PPI, Partai PRN, PKNU, PKPB, PPPI, PKPI dan PPDI. Partinya sendiri tidak member dukungan.

Dibandingkan Sulaiman dan Zulfan, Partai Golkar tidak terlalu mempertimbangkan Normasyah Wahab, meskipun nama yang disebut terakhir ini merupakan mantan Ketua DPC Partai Golkar Bengkalis. Normasyah merebut Partai Golkar Bengkalis tahun 2005, sekaligus menghantarkan kemenangannya sebagai Wakil Bupati Bengkalis berpasangan dengan Syamsurizal. Namun bulan madu kepemimpinan Syamsurizal – Normasyah tidak berlangsung lama. Keduanya pecah kongsi di tahun

kedua kepemimpinan mereka. Sebab itu, meski Wakil Bupati, Normansyah sering kali mencitrakan dirinya seolah berada di luar pemerintahan. Bengkalis memang berada dalam kendali Syamsurizal (Bupati) dan Sulaiman (Sekretaris Daerah), dan Normansyah berada di luar orbit tersebut (Wawancara Saiman Pakpahan, 1 Februari 2010).

Karir politik Normansyah di Partai Golkar tidak tergolong cemerlang. Resistensi pimpinan ranting terhadap kepemimpinan Normansyah cukup tinggi. Dalam penilaian para kader, mantan Komisar PT Arara Abadi (perusahaan perkayuan yang paling banyak berkonflik dengan masyarakat tempatan di Riau) ini, lebih menampilkan diri sebagai seorang pemimpin perusahaan dibandingkan pemimpin partai politik. Perbedaan sikap dan pandangan politik disikapinya dengan aksi pemecatan.

Seperti halnya Zulfan, Normansyah sering bertindak di luar orbit politik Rusli Zainal. Konflik antara keduanya memuncak saat dia memutuskan mendukung pencalonan Surya Paloh dalam Munas Partai Golkar VIII tanggal 7-10 Agustus 2009 di Pekanbaru (Wawancara Idham Chalid, 30 Januari 2010). Saat bersamaan, Rusli Zainal sedang menggalang dukungan untuk Abu Rizal Bakrie. Sampai sehari menjelang Munas, hanya Bengkalis yang belum berhasil diyakinkan untuk membuat suara Partai Golkar di Riau secara bulat mendukung Abu Rizal Bakri. Kelompok Rusli Zainal akhirnya mempersoalkan legalitas Normansyah sebagai delegasi Bengkalis. Normansyah tidak berhasil menggunakan hak suaranya saat voting pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dilakukan. Sekitar dua bulan setelah peristiwa tersebut, Normansyah menyatakan mundur dari Partai Golkar.

Pemberitaan media masa memperlihatkan keinginan keras Partai Golkar untuk mendukung pencalonan Sulaiman berpasangan dengan kader murni partai. Tapi, sampai masa pendaftaran pasangan bakal calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah memasuki hari terakhir, Partai Golkar Bengkalis belum berhasil memastikan dukungan politiknya. Sulaiman Zakaria – Anwar Mahidin, Zulfan Heri – Syahril Yunan, Herliyan Saleh – Suaytno, dan Normansyah Wahab – Syamsul Gusri sudah mendaftarkan pencalonan masing-masing ke KPUD Bengkalis. Perahu Partai Golkar kini tidak lagi menjadi kenderaan yang menentukan, karena masing-masing calon sudah memiliki dukungan politik yang mencukupi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Setelah masa pendaftaran ditutup, utusan Partai Golkar mendatangi KPUD Bengkalis. Tujuannya, menghantarkan surat pernyataan dukungan terhadap pasangan Sulaiman Zakaria – Anwar Mahidin. Namun, partai ini harus berbesar hati menerima keputusan KPUD Bengkalis yang membatalkan dukungannya untuk Sulaiman Zakaria – Anwar Mahidin. Pada akhirnya, ibarat kata pepatah, karena mengejar rusa, kancil pun tak didapatkan Partai Golkar. Partai Golkar yang merupakan pemenang dalam pemilu legislatif di Bengkalis, harus menerima kenyataan hanya tercatat sebagai peserta penggembara, pendukung tak resmi untuk pasangan Sulaiman Zakaria – Anwar Mahidin.

Indragiri Hulu: Berkah Politik Balas Budi

Hasil survey LSI di Indragiri Hulu menempatkan tiga nama yang memperoleh dukungan paling besar, yakni Tengku Razmara, Soegianto, dan Emrizal Pakis. Dua nama yang disebutkan pertama menempati posisi berimbang di mata pemilih, sementara Emrizal Pakis menyusul di belakangnya dengan jarak yang cukup signifikan. DPP Partai Golkar menawarkan kepada pimpinan partai di daerah untuk mengerucutkan dukungan kepada salah satu dari tiga nama tersebut.

Bagi Partai Golkar Riau, tiga nama yang ditawarkan pimpinan pusat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tengku Razmara, Sekretaris Daerah Indragiri Hulu merupakan figur birokrat berpengalaman. Karir birokrasinya mulai terlihat saat dia menduduki jabatan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Riau masa Gubernur Saleh Djasit. Keberhasilannya menempati posisi yang cukup strategis tersebut tidak lepas dari peranan keluarga besarnya, Tengku Rivai Rachman,

mantan Sekretaris Daerah Riau dan mantan Wakil Gubernur Riau pada masa Soeripto. Saat pemilihan Gubernur Riau tahun 2003, dimana kandidat yang bersaing Saleh Djasit, Rusli Zainal dan Tengku Lukman Jaafar; Rivai Rahman berada dibarisan pendukung RZ. Sehingga pada masa pemerintahan Rusli Zainal, karir birokrasi Tengku Razmara semakin membaik.

Hubungan Razmara dengan Rusli Zainal berlangsung dinamis. Di penghujung pemerintahan Rusli Zainal periode pertama, komunikasi keduanya kurang intensif. Saat pemilihan Gubernur Riau pada 2008, Razmara tidak menampakkan keberpihakan pada pencalonan kembali Rusli Zainal sebagai Gubernur. Ia terkesan lebih dekat dengan anggota keluarga besarnya, Tengku Thamsir Rahman, Bupati Indragiri Hulu saat itu yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur pada pilkada Riau. Razmara dipromosikan menjadi Sekretaris Daerah Indragiri Hulu saat Wan Abubakar menjabat sebagai Plt. Gubernur Riau.

Tabel 3 :

Peserta Pilkada 2010 dan Partai Pendukung di Kabupaten Indragiri Hulu

KANDIDAT	PARTAI PENDUKUNG
Tengku Razmara – Herawati	Partai Demokrat, PDIP, PKS, PKNU dan Partai Patriot
Mujtahid Thalib – Marjohan Yusuf	PDP, Partai Barnas, PPRN, PDS, Partai Buruh, PIS, PMB, PAN, PBR, PPD dan Partai RepublikaN.
Yopie Arianto – Herman Harmaini	Partai Golkar, PPP, PKB, PKPI, Hanura, PNI Marhaenisme, PPDI, PPI, dan PSI.
Amedtrip Praja – Zulfahmi Adrian	PKPB, PDK, Partai Pakar Pangan dan PBB

Sumber : Pleno KPUD Indragiri Hulu, April 2010

Soegianto menanggapi dingin kemunculan namanya pada daftar tiga besar survey LSI. Dia memang tidak mempersiapkan diri mencalonkan diri di Pilkada Indragiri Hulu karena pertimbangan usia dan kesehatan. Sebagai gantinya, dia telah menyusun langkah matang agar anaknya, Yopie Arianto, mencalonkan diri melalui perahu Partai Golkar. Pada pemilu legislatif 2009, Soegianto berhasil mendorong Yopie menjadi anggota DPRD Riau. Tidak sampai setahun kemudian, tanpa terlepas dari perannya pula, Yopie terpilih sebagai Ketua Partai Golkar Indragiri Hulu secara aklamasi saat Musda DPC Partai Golkar Indragiri Hulu. Baginya, saat ini kesempatan terbaik dimana dirinya masih memiliki kemampuan mendorong anaknya mencalonkan diri sebagai Bupati Indragiri Hulu.

Yopie Arianto, tidak termasuk tiga besar hasil survey LSI. Hasil survey LSI ditanggapinya dengan dingin. Dia yakin memiliki dukungan di lapangan lebih dari yang berhasil ditemukan LSI. Joni Alpen, anggota Partai Golkar yang merupakan pendukung Yopie mengatakan bahwa perolehan suara Yopie pada Pemilu Legislatif sebesar 30.000 pemilih merupakan petunjuk bahwa Yopie memiliki dukungan yang lebih besar dari yang diperkirakan LSI.

Al azhar, seorang Budayawan yang diwawancarai mengatakan bahwa sedikitnya terdapat dua klan politik di Indragiri Hulu (Wawancara Al azhar, Budayawan Riau, 4 Februari 2010). Kelompok pertama adalah keluarga bangsawan bekas Kerajaan Indragiri, yang patron tertingginya Rivai Rahman. Razmara adalah keluarga besar Rivai Rahman. Pada tahun 2005, kelompok ini secara solid mendukung pencalonan anggota keluarga besar mereka, Thamsir Rahman, untuk menjadi Bupati Indragiri Hulu. Keluarga bekas bangsawan kerajaan Indragiri ini selalu menyatu dalam soal kepentingan ekonomi politik mereka guna mempertahankan prestise dan status “keningratan” keluarga mereka.

Kelompok kedua adalah kelompok kesukuan Jawa dengan basis di kawasan transmigrasi dan perkebunan, dengan patron tertingginya Soegianto. Soegianto figur yang dihormati di Partai Golkar Riau. Dia memiliki hubungan baik dengan Rusli Zainal, dan merupakan salah satu donator penting saat pencalonan kembali Rusli Zainal untuk posisi Gubernur. Kemenangan telak Partai Golkar di Indragiri Hulu dalam tiga kali pemilu legislatif tahun 1999, 2004 dan 2009, tidak lepas dari ketokohan figur Soegianto. Dia memiliki dukungan luas tidak hanya di lingkungan komunitas Jawa di daerah tersebut, tetapi juga komunitas masyarakat beretnis Melayu.

Pimpinan Pusat Partai Golkar tampaknya lebih cenderung kepada Tengku Razmara ataupun Soegianto, dibandingkan Emrizal Pakis. Namun keputusan Soegianto yang memastikan tidak mencalonkan diri dengan mendorong pencalonan Yopie Arianto melalui Partai Golkar, menjadikan pilihan tertuju ke arah Razmara. Namun, persoalan rekrutmen calon kepala daerah di Indragiri Hulu ini menjadi pelik karena sumbangan Soegianto terhadap partai selama ini tidak mungkin dilupakan elite partai Golkar di Riau.

Pada akhirnya, DPD I dan II Partai Golkar Riau sepakat untuk mendukung pencalonan Yopie Arianto sebagai calon Bupati Indragiri Hulu, meski ini berbeda dengan kehendak pimpinan pusat. Rusli Zainal, Soegianto dan Indra Mukhlis Adnan perlu disebut sebagai nama yang menentukan terkait pencalonan Yopie Arianto. Betapapun, keputusan Partai Golkar mencalonkan Yopie ini tetaplah sebuah eksprimen politik: melawan kuasa survey dalam rekrutmen calon kepala daerah. Tidak dapat dipungkiri, politik balas budi memainkan peranan kunci. Tidak ditemukan pertanda yang bisa memastikan apakah pendukung Soegianto akan dapat diarahkan untuk mengalihkan dukungan ke anaknya, Yopie Arianto. Agaknya, mendengarkan pendapat Soegianto lebih penting dari kemenangan partai dan rekomendasi pimpinan pusat.

Revolusi Senyap: Kemenangan dan Kekalahan Partai Golkar

Awan cerah memayungi langit Dumai, Bengkalis dan Indragiri Hulu pada 3 Juni 2010. Ini adalah hari dimana rakyat jelata, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan yang telah terdaftar sebagai pemilih kini menjelma sebagai pribadi-pribadi paling berkuasa menentukan kepemimpinan di daerah masing-masing untuk lima tahun mendatang. Di bawah kendali merekalah masa depan Indragiri Hulu, Bengkalis dan Dumai sedang ditentukan masa depannya.

Mereka datang dari pusat-pusat perkotaan dan perkampungan. Mereka meninggalkan rutinitas sekedar untuk mengantri di tempat-tempat pemungutan suara. Orang Talang Mamak di Indragiri Hulu dan orang Sakai di Bengkalis, dua suku asli (indigenous people) yang berdomisili di daerah pedalaman mendatangi TPS, dan siap menjadi hakim yang memutuskan arah masa depan daerah mereka. Melalui revolusi senyap dari bilik-bilik pemungutan suara, mereka seolah bersepakat membangun sebuah persekutuan rahasia: menentukan yang dinilai paling mampu memperbaiki nasib mereka. Tidak ada lembaga independen yang melakukan Quick Count pada Pilkada di Dumai, Bengkalis dan Indragiri Hulu. Karena itu, sehari setelah pemungutan suara belum didapatkan prediksi yang meyakinkan mengenai kandidat mana yang akan memenangkan kompetisi mendebarkan tersebut. Namun, bagi para elite Partai Golkar baik di propinsi maupun tiga kabupaten bersangkutan, laporan para saksi di setiap TPS yang mulai memperlihatkan—meski masih secara remang-remang—nasib para kandidat yang mereka unggulkan.

Goresan pena para pemilih di bilik pemungutan suara yang sepi pada siang yang cerah itu, perlahan menjelma menjadi awan kelabu bagi Partai Golkar. Pilkada di empat Kabupaten/Kota di Riau ditutup dengan kemenangan Partai Golkar hanya di Indragiri Hulu. Selebihnya, kekalahan yang mengejutkan terjadi di Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Sepuluh hari kemudian KPUD di

masing-masing daerah melakukan sidang pleno dan secara resmi mengumumkan kemenangan pasangan Khairul Anwar – Agus Widayat di Dumai; Herlian Saleh – Suayatno di Bengkalis; Yopie Arianto – Herman Harmaini di Indragiri Hulu; dan Irwan Nasir – Masrul Kasmi di Kepulauan Meranti. Persekutuan rahasia pun tersingkap: masyarakat telah memilih jalan mereka sendiri.

Tabel 4 :

Distribusi Perolehan Suara pada Pilkada 2010 di Indragiri Hulu

Kandidat	Suara (Prosentase)	Keterangan
Tengku Razmara – Herawati	28.392 (19,26)	Incumbent
Mujtahid Thalib – Marjohan Yusuf	36.014 (24,44%)	Incumbent
Yopie Arianto – Herman Harmaini	53.791 (36,50%)	Non Incumbent
Amedtribja Praja – Zulfahmi Adrian	29.183 (19,80%)	Non Incumbent

Sumber : Pleno KPUD Indragiri Hulu, 8 Juni 2010

Tabel 5 :

Distribusi Perolehan Suara pada Pilkada 2010 di Dumai

Kandidat	Suara (Prosentase)	Keterangan
Zulkifli As – Sunaryo	49.181 (46,37%)	Incumbent
Khairul Anwar – Agus Widayat	52.778 (49,76%)	Non Incumbent
Herdi Selioso – Mas Irba Sulaiman	4.103 (3,87%)	Non Incumbent

Sumber : Pleno KPUD Indragiri Hulu, 10 Juni 2010

Tabel 6 :

Distribusi Perolehan Suara pada Pilkada 2010 Bengkalis

Kandidat	Suara (Prosentase)	Keterangan
Sulaiman Zakaria – Anwar Mahidin	87.939 (38,76%)	Incumbent
Herliyan Saleh- Suayatno	96.437 (43,53%)	Non Incumbent
Normansyah Wahab – Syamsul Gusri	14.524 (6,54%)	Incumbent
Zulfan Heri – Syahril Yunan	22.625 (10,21%)	Non Incumbent

Sumber : Pleno KPUD Indragiri Hulu, 8 Juni 2010

Partai Golkar berhasil merebut Indragiri Hulu dari Partai Demokrat, tetapi harus merelakan Bengkalis direbut PKS. Di Dumai, Partai Golkar telah berbesar hati melepaskan kontrolnya selama lima tahun terakhir, dan akan melanjutkan untuk lima tahun mendatang, karena PDIP yang berhasil merebut daerah ini dari kendali Partai Demokrat. Sementara di Kepulauan Meranti, Partai Golkar harus merelakan kabupaten yang baru pertama kali menyelenggarakan Pilkada ini dipimpin PPP selama lima tahun mendatang. Untuk tambahan informasi, PPP memang lebih berhak atas posisi ini, karena rekomendasi dari pemerintah propinsi (bagian tersulit dalam perjuangan pembentukan kabupaten Kepulauan Meranti) didapatkan pada saat kader PPP, Wan Abu Bakar, menjabat sebagai Plt. Gubernur Riau. Demikian pula pasangan yang diusung partai ini, terutama Irwan Nasir, merupakan salah satu tokoh muda yang paling identik dengan perjuangan pembentukan kabupaten Kepulauan Meranti.

Pilkada di tiga daerah agaknya memang disiapkan sebagai pesta rakyat penuh kejutan. Tidak satupun calon berlatar belakang incumbent —baik Bupati/Walikota, Wakil Bupati, ataupun Sekretaris Daerah— yang menang. Mereka yang dinilai masyarakat paling bertanggung-jawab atas kondisi daerah masing-masing telah menyaksikan pengadilan rakyat. Di Indragiri Hulu, Mujtahid Thalib (Bupati) dan Tengku Razmara (Sekretaris Daerah) harus mengakui bahwa Yopie Arianto, pemuda berumur 32 tahun dan belum menikah, lebih diinginkan rakyat. Normansyah Wahab (Wakil Bupati) dan Sulaiman Zakaria (Sekretaris Daerah) di Bengkalis, dikalahkan Herliyah Saleh. Sementara pasangan incumbent di Dumai, Zulkifli As – Sunaryo, yang sangat percaya diri kini meratapi kekalahan.

Demikian pula, tidak kalah mengejutkan, kenyataan tidak adanya seorang calon pun yang sebelumnya diunggulkan Survey LSI tampil sebagai pemenang. Yopie Arianto di Indragiri Hulu, Khairul Anwar di Dumai, dan Herliyan Saleh di Bengkalis memang bukan nama-nama yang masuk dalam tiga besar pada survey LSI yang dilakukan enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada. Sebagian orang menilai peristiwa ini di luar kelaziman. Sebab, selama ini survey perilaku pemilih yang dilakukan LSI selalu presisi dan akurat.

Kredibilitas survey LSI kembali menjadi sorotan publik. Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan media massa setempat, Abu Bakar Sidik, mantan anggota DPRD Riau dan fungsionaris Partai Golkar menyoal akurasi survey LSI. Karena, demikian dia beralasan, calon yang diusung Partai Golkar berdasarkan masukan survey ternyata semuanya kalah. Sebaliknya, calon yang menang di Indragiri Hulu justru bukan orang direkomendasikan survey. Partai Golkar di daerah bahkan mengambil resiko berkonflik dengan dewan pimpinan pusat atas pencalonan Yopie Arianto di Indragiri Hulu.

Dani Kartika, sekretaris Tim Pemenangan pasangan Khairul Anwar – Agus Widayat, menyatakan bahwa sejak awal dia mempertanyakan metodologi survey yang dilakukan LSI. Sebab, demikian Kartika beralasan, tim Khairul Anwar – Agus Widayat juga melakukan survey yang dilakukan sebuah lembaga independen dari Yogyakarta. Dia sejak awal mengaku sudah yakin kalau calon yang mereka usung akan menang. Sebab, berdasarkan survey yang mereka lakukan, pasangan Khairul Anwar – Agus Widayat unggul atas Zulkifli As – Sunaryo (Wawancara Dani Kartika, 21-22 Juni 2010).

Survey LSI memang dilakukan lebih dari enam bulan sebelum pelaksanaan pilkada, sehingga tidak up to date untuk dijadikan rujukan saat pemilihan di lakukan. Tapi, meresponi berbagai sorotan tentang hasil survey, lima belas hari pasca pelaksanaan Pilkada, LSI kembali melakukan studi kualitatif. Tujuannya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekalahan dan kemenangan calon kepala daerah di Dumai. Tiga orang diwawancari secara mendalam, terdiri dari representasi tim pemenang pilkada (Dani Kartika, Sekretaris Tim Sukses Khairul Anwar), tim yang kalah (Aprizon, anggota tim sukses calon Partai Golkar) dan satu orang dari kalangan jurnalis (Muhammad Amin, redaktur Riau Pos). Hasilnya, dua dari tiga orang yang diwawancarai menyimpulkan isu perubahan yang diusung Khairul Anwar – Agus Widayat menarik simpati pemilih dan cukup menentukan kemenangan pasangan ini.

Dani Kartika mengatakan, saat memimpin Dumai, Zulkifli As – Sunaryo tidak berhasil menyelesaikan masalah infrastruktur, air bersih, pembangunan SDM, masalah kesehatan dan isu-isu publik lainnya. Pengadaan air bersih merupakan janji kampanye Zulkifli As saat mencalonkan diri pada 2005, tapi baru dibangun di tahun terakhir kepemimpinannya (Wawancara Dani Kartika, 21-22 Juni 2010), justru itupun ditengarai bermasalah. Beberapa hari menjelang kampanye, proyek pembangunan air bersih sempat menuai kontroversi, karena kasus pipa yang meledak. Hal ini turut mempengaruhi citra pemerintahan Zulkifli As di mata Masyarakat (Wawancara Aprizon, 22 Juni 2010).

Pembangunan pelabuhan agro bisnis dan kapal penyeberangan Roro Dumai – Malaka yang dilakukan Zulkifli As dinilai sebagai proyek yang tidak bersentuhan kepentingan rakyat kecil tapi menelan biaya besar. Zulkifli As sebetulnya menerapkan pengobatan gratis, tetapi masyarakat menilai sebagai terobosan Kepala Dinas Kesehatan, Agus Widayat, calon Wakil Walikota berpasangan dengan Khairul Anwar. Agus Widayat menghidupkan Posyandu, sehingga memungkinkannya sering turun dan bertatap muka dengan masyarakat di berbagai desa/kelurahan. Tim Khairul cukup berhasil membangun citra kegagalan pemerintahan Zulkifli As. Pembangunan infrastruktur jalan propinsi di Dumai yang rusak parah misalnya, mestinya merupakan tanggung jawab propinsi. Tetapi oleh Tim Khairul dijadikan isu kampanye untuk membuktikan kegagalan Zulkifli As (Wawancara Dani Kartika, 21-22 Juni 2010; Aprizon, 22 Juni 2010; dan Muhammad Amin 21 Juni 2010).

Terkait jaringan sosial yang dipakai dan strategi yang digunakan untuk menggerakkan, tampaknya cukup pula mempengaruhi kemenangan dan kekalahan calon. Menurut Dani Kartika, Tim Khairul memilih memperbanyak frekuensi pertemuan dengan masyarakat *door to door*, di seluruh pelosok kampung (Wawancara Dani Kartika, 22 Juni 2010). Bantuan langsung tunai memang sama-sama dilakukan kedua pasangan. Tetapi mekanisme penyaluran bantuan yang digunakan Tim Zulkifli As melalui Partai Koalisi dan ormas-ormas yang ada di Dumai, sehingga yang bisa sampai dan langsung dirasakan masyarakat lebih sedikit dari yang mesti diterima. Koalisi partai pendukung Zulkifli As yang terlalu gemuk memang menguntungkan dalam pembentukan citra, tapi menjadikannya sebagai kendaraan terlalu lamban gerakannya. Sebaliknya, Tim Khairul yang ramping memungkinkan bagi pengalokasian hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan ril dan temporal pemilih.

Strategi politik lainnya yang tampaknya cukup berpengaruh agaknya terkait dengan lambannya penegasan kepastian pasangan Khairul Anwar – Agus Widayat mencalonkan diri. Keputusan yang lamban ini mengakibatkan kekhawatiran di Tim Zulkifli As soal kemungkinan tidak adanya partai diluar koalisinya yang akan mengajukan calon. Situasi ini disikapi dengan Tim Zulkifli As dengan menyiapkan lawan bayangan sebagai peserta Pilkada. Kehadiran pasangan Herdi Solioso – Mas Irba Sulaiman yang mengandalkan basis yang sama dengan basis pendukung Zulkifli As, memang akhirnya cukup mengganggu perolehan suara Zulkiflis As. Menurut Aprizon, mengingat tipisnya selisih perolehan suara Zulkifli As dan Khairul Anwar, maka apabila calon yang maju hanya mereka dua, peluang kemenangan Zulkifli As lebih besar. Strategi Khairul Anwar, dalam hal mengundurkan kepastiannya mencalonkan diri terbukti menjadi salah satu strategi politik yang efektif (Wawancara Aprizon, 22 Juni 2010).

Selain itu, faktor personalitas kandidat sebagaimana disebutkan dimuka tampaknya memiliki peranan menentukan terhadap kemenangan dan kekalahan calon. Sebelumnya, Khairul Anwar sudah mencalonkan diri pada Pilkada Dumai 2005, ketika itu dia dikalahkan Zulkifli As. Di mata masyarakat Dumai, Khairul Anwar sudah lama dikenal. Sementara itu, Agus Widayat dikenal sebagai pejabat yang lebih merakyat dibandingkan banyak pejabat lainnya di Dumai. Kebijakannya tentang pengobatan gratis selama mengepalai Dinas Kesehatan memungkinkannya dirinya dikenal luas masyarakat.

Di tengah situasi yang seperti itu, maka dapat dipahami apabila isu perubahan yang menjadi tema kampanye Khairul Anwar – Agus Widayat menempati posisi paling menentukan bagi kemenangan mereka. Mengutip pernyataan Aprizon, “Benar, Zulkifli As tidak memiliki masalah kontroversial di mata masyarakat, tetapi dia juga dinilai tidak banyak melakukan perubahan berarti selama memimpin Dumai. Dalam hal ini, siapapun calon yang “mewiridkan perubahan” pastilah dia lebih mempesona di mata pemilih, terutama pemilih Dumai yang karakteristiknya perkotaan dan rasional.” Kemenangan Khairul Anwar, sama kasusnya dengan kemenangannya Pilkada 2005. Ketika itu, Zulkifli As, memenangkan Pilkada di luar perkiraannya, karena berada ditengah-tengah pemilih rasional yang sudah tidak

menginginkan kepemimoinan Wan Syamsir Yus. Sayangnya, Zulkifli As sekarang dinilai masyarakatnya tidak mampu mewujudkan perubahan yang janjikkannya (Wawancara Aprizon, 22 Juni 2010).

KESIMPULAN

Pemaparan di atas memperlihatkan, kebijakan pimpinan pusat Partai Golkar menerapkan survey sebagai pertimbangan dalam rekrutmen calon kepala daerah, secara institusional diterima dan dipahami pimpinan partai di Riau. Namun, kader di daerah yang memandang survey kurang menguntungkan bagi penerapan strategi kemenangan partai di daerah, ataupun menghambat kesempatan kader mencalonkan diri dengan menggunakan perahu Partai Golkar; merespon kebijakan tersebut secara kritis. Mekanisme rekrutmen terbuka yang memberi kesempatan setara antara kader internal partai dan calon dari luar partai dinilai kurang menghargai kontribusi kader di daerah yang selama ini sudah bekerja keras untuk membesarkan partai.

Survey dinilai tidak mampu mendeteksi relasi politik antara elite dan kader Partai Golkar di daerah dengan calon yang diusung partai berdasarkan pertimbangan survey. Sehingga, saat calon yang direkomendasikan pimpinan pusat partai bukan orang yang memiliki komunikasi politik yang bagus terhadap kader kunci partai di daerah, hal demikian kurang produktif bagi pencapaian tujuan kemenangan partai. Elite partai di daerah berpotensi kehilangan militansi, karena yang diusung bukan kader murni partai. Hal ini biasanya sebagai akibat komunikasi politik antara calon yang diusung partai dengan para kader masih belum intensif.

Pelaksanaan survey yang dilakukan hanya sekali saat penjaringan, atau tidak dilakukan setelah pasangan calon kepala – wakil kepala daerah disahkan KPUD; mengakibatkan survey tidak mampu mendeteksi perubahan perilaku pemilih saat pasangan calon sudah dipastikan. Padahal sifat temporalitas survey opini publik sangat tinggi, karena faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih selalu mengalami perubahan secara dinamis dan cepat. Psikologi dan perilaku pemilih dipastikan memberikan jawaban berbeda saat ditanya dalam situasi sebelum penetapan calon dengan sesudah penetapan calon secara resmi.

Elite partai maupun kader yang kurang memahami sifat temporal survey cenderung mempersoalkan akurasi dan presisi survey saat hasil pilkada tidak sesuai dengan temuan survey. Masyarakat, terutama sebagian elite partai yang kurang memahami makna dan sifat temporal sebuah survey perilaku politik, melihat kemenangan ataupun kekalahan calon yang diusung Partai Golkar sebagai “tanggung-jawab” lembaga pelaksana survey. Pada kasus di Riau misalnya, LSI (Lembaga Survey Indonesia) dihadapkan kesulitan memberikan klarifikasi ke publik karena perbedaan hasil survey dan hasil resmi pemungutan suara. Padahal dalam konteks studi kasus artikel ini, survey tersebut dilakukan enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga dipastikan sudah kadaluarsa. Karena itu, selain pada saat penjaringan calon, survey opini publik perlu dilakukan setelah pasangan calon ditetapkan KPUD, agar perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih segera dideteksi dimendapatkan treatment yang tepat.

REFERENSI

- Adler, G. J., Fulton, B. R., & Hoegeman, C. (2020). Survey Data Collection Methods and Discrepancy in the Sociological Study of Religious Congregations. *Sociology of Religion*, 81(4), 371–412. <https://doi.org/10.1093/socrel/sraa002>
- Ansor, M. (2006). Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS di Sidang Tahunan MPR 1999-2002. *ULUMUNA*, 9(2), 313–332. <https://doi.org/10.20414/ujs.v9i2.490>
- Ansor, M. (2016). Post-islamism and the remaking of islamic public sphere in post-reform Indonesia.

- Studia Islamika*, 23(3), 471–515. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i3.2412>
- Ansor, M., Alwi, R., Zulfikar, I., Masyhur, L. S., & Alit, A. (2023). Pencarian Rekognisi dan Legalitas Perkawinan Secara Adat Pada Suku Asli Anak Rawa di Siak Provinsi Riau. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2), 151–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/lentera.v5i2.7544>
- Ansor, M., & Darwis, M. (2006). *Membangkitkan Otonomi Lokal: Dari Sejarah Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir Hingga Implementasi Otonomi Daerah*. JSPDL.
- Ansor, M., & Masyhur, L. S. (2023). Satu kampung enam iman: Penguatan integrasi sosial melalui perayaan Tujuh Liku pada suku asli Anak Rawa di Siak, Riau. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.32505/connection.v3i1.6242>
- Ford, M. (2014). Learning by Doing: Trade Unions and Electoral Politics in Batam, Indonesia, 2004–2009. *South East Asia Research*, 22(3), 341–357. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0219>
- Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2022). Why democrats abandon democracy: Evidence from four survey experiments. *Party Politics*, 28(3), 554–566. <https://doi.org/10.1177/1354068821992488>
- Fukuoka, Y. (2012). Politics, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia. *CONTEMPORARY SOUTHEAST ASIA*, 34(1), 80–100. <https://doi.org/10.1355/cs34-1d>
- Hasbullah, H., Wilaela, W., Masduki, M., Jamaluddin, J., & Rosidi, I. (2022). Acceptance of the existence of salafi in the development of da'wah in Riau Islamic Malay society. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2107280. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2107280>
- Helmiati, H. (2021). Nurturing Islamic and Socio-political Thoughts in Riau and Beyond: Exploring Raja Ali Haji's Works. *Journal of Al-Tamaddun*, 16(2), 99–109. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol16no2.8>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2009). Manajemen Data dan Metode Analisis. In N. K. Denzim (Ed.), *Handbook of Qualitative Research*. Lincoln, Yvonna S.
- Long, N. J. (2013). *Being Malay in indonesia: Histories, Hopes and Citizenship in the Riau archipelago*. NUS Press and Nias Press.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2019). The mobilisation of intolerance and its trajectories: Indonesian Muslims' views of religious minorities and ethnic Chinese. In *Contentious Belonging* (pp. 155–174). ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814843478-013>
- Muhtadi, B. (2021). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mujani, S. (2008). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya, Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Gramedia.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisa tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Mizan.
- Nurcholifah, N. (2022). Leadership of the Golkar Party after the New Order (Comparative Study of Leadership Patterns of Akbar Tandjung [Period 1999-2004] and Muhammad Jusuf Kalla [Period 2004-2009] in the Golkar Party). *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 9(4), 137–145. <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v9i4.5>
- Nurlinah, Darwin, R. L., & Haryanto. (2018). After Shari'ah: Islamism and Electoral Dynamics at Local Level in Indonesia. *Global Journal Al Thaqafah*, 8(2), 17–29. <https://doi.org/10.7187/GJAT122018-2>
- Tanjung, A. (2007). *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tomsa, D. (2020). *Public Opinion Polling and Post-truth Politics in Indonesia*. 42(1), 1–27. <https://doi.org/10.1355/cs42-1a>
- Trihartono, A. (2014). Beyond Measuring the Voice of the People: The Evolving Role of Political Polling in Indonesia's Local Leader Elections. *Southeast Asian Studies*, 3(1), 151–182.
- Zakaria, F. (2004). *Masa Depan Kebebasan: Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain*. PT Ina Publikatama.

